

NARATIVE REVIEW DARI URBAN EQUITY BENTUK PEMANFAATAN RUANG DAN EKONOMI PENDUDUK PERKOTAAN

(NARRATIVE REVIEW OF URBAN EQUITY FORM OF SPACE UTILIZATION AND URBAN POPULATION ECONOMY)

Nadiatul khairiah*, Suryanto*

* Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada
Jl. Grafika No.2, Sekip, Yogyakarta, 55281, Indonesia
Email: Nadiatulkhairiah@mail.ugm.ac.id

Diterima: 22 Mei 2023; Direvisi: 23 Agustus 2023; Disetujui: 29 Agustus 2023

ABSTRAK

Ketimpangan merupakan fenomena permasalahan yang harus diatasi dalam perwujudan perencanaan pembangunan berbasis *sustainable planning*. Upaya pemerataan berkaitan erat dengan aspek perencanaan sosial dan ekonomi dalam pembangunan perkotaan maupun wilayah. *Equity* pada dasarnya harus dipahami terlebih dahulu dalam mewujudkan *equality* dalam perencanaan. Kajian seputar *equity* pada perencanaan kota memerlukan penjelasan yang lebih rinci terutama dalam mencari metode dan kebijakan yang tepat dalam perwujudan strategi perencanaan dan perancangan perkotaan. Konsep *urban equity* berkaitan dengan perwujudan akhir dari *spasial justice* dan *just city*. Prinsip keadilan dalam perencanaan perkotaan memerlukan pendalaman secara kontekstual melalui penggambaran fakta empiris dan fenomena ketimpangan masing-masing pada penduduk perkotaan. Pembahasan seputar ketimpangan yang dikaitkan pada isu pemerataan secara umum membahas dari segi ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Curva U terbalik oleh Simon Khuznet. Namun pada beberapa konteks wilayah, teori ini menuai banyak kritikan karena ketidaksesuaian secara kontekstual. Perlunya penggambaran bagaimana perencanaan khususnya kota dalam merencanakan ruang perkotaan yang sesuai dengan konteks sosial-ekonomi. Adapun tujuan dari paper ini adalah mengungkap dan menjelaskan keterkaitan dari bentuk pemanfaatan ruang kota dengan tingkat ketimpangan ekonomi penduduk perkotaan secara spasial. Manfaat dari paper narative literatur ini adalah memberikan kontribusi teoritis dalam pengayaan terkait hubungan bentuk pemanfaatan ruang kota dengan pemerataan ekonomi penduduk, spasial marginalisasi, *spasial justice*, *urban equity*, dan *equitable planning*. Hasil dari paper ini adalah adanya hubungan ketimpangan dari marginalisasi sosio-ekonomi penduduk perkotaan yang dipengaruhi oleh struktur dan pola guna lahan berupa lokasi tempat tinggal, distribusi pekerjaan, distribusi transportasi umum, dan proses marginalisasi ketimpangan penduduk di perkotaan.

Kata kunci: Perencanaan Berkeadilan, Pemerataan Perkotaan, Kota Yang Adil, Keadilan Sosial, Pembangunan Berkelanjutan

ABSTRACT

Inequality is closely related to social and economic planning aspects in urban and regional development. Equity basically must be understood in advance in realizing equality in planning. Studies on equity in urban planning are still being discussed, especially in finding the right methods and policies for realizing urban planning and design strategies. Urban equity is related to the ultimate realization of spasial justice and just city. The principle of justice in urban planning requires contextual insight through the description of empirical facts and inequality among urban residents. The discussion about inequality which is related to the issue of equity in general discusses in terms of income inequality as measured through the inverted Curva-U by Simon Khuznet. However, in several regional contexts, this theory has drawn a lot criticism duet o contextual incompatibility. The need to describe how planning, especially planning in urban space through socio-economic context. The purpose of this paper is to reveal and explain the relationship between urban spasial use and the level of urban economic inequality. The benefit of this narrative literature is to provide theoretical contributions in enrichment related to the relationship between the form of urban space utilization and the

distribution of the population's economy, spasial marginalization, spasial justice, urban equity, and equitable planning. The result is an inequality relationship from the socio-economic marginalization of the urban population which is influenced by the structure and pattern of land use in the form of residential location, distribution of work, distribution of public transportation, and the process of marginalization of urban population inequality.

Keywords: *Equitable Planning, Urban Equity, Just City, Social Justice, Sustainable Dvelopment*

PENDAHULUAN

Pemanfaatan ruang perkotaan menjadi aspek penting dalam menetapkan arah perkembangan suatu kota. Arah perkembangan dapat dipicu dari berbagai faktor dan dimensi ilmu, baik ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Basis pembangunan berorientasi penduduk saat ini menjadikan pertimbangan dalam penyesuaian perkembangan kota mengikuti pertumbuhan penduduk yang dipicu oleh penetapan pemanfaatan ruang, seperti di gunakan di negara berkembang, sehingga orientasi pergerakan penduduk seperti perpindahan penduduk (urbanisasi). Berbagai bentuk urbanisasi yang terjadi di negara berkembang terutama pada kota yang kekurangan sumber daya cenderung tumbuh lebih cepat namun tidak teratur, memungkinkan adanya ketimpangan pada sebagian besar penduduk kota terutama yang bekerja pada sektor informal (Mahendra et al., 2021).

Dalam tujuan agenda pembangunan internasional, seperti SDGs 2030 menjadikan *deadline* global para perencana dalam mewujudkan perencanaan yang adil (*equitable planning*) di pusat kota. Ketimpangan atau *inequality* biasanya diukur melalui analisis ketimpangan pendapatan, namun penelitian tersebut masih mencakup dalam satu dimensi masalah saja. Berbagai metode pengukuran, alat, dan indikator masih menjadi perbincangan para perencana kebijakan publik terutama penelitian ketimpangan secara spasial. Perencanaan *spasial equity* berhubungan dengan level fasilitas pada ruang publik dan distribusi perumahan (Pérez-Paredes & Krstikj, 2020). Ketimpangan dalam akses menuju infrastruktur serta layanan umum menjadi hal penting dalam memberikan pengaruh besar pada kehidupan masyarakat, *livelihoods*, dan prospek dalam jangka panjang. Pandangan orang dalam menjalani kehidupan di perkotaan dibentuk dari akses menuju area pelayanan dan pertimbangan peluang seperti bagaimana mendapatkan perumahan yang aman dan terjangkau, air bersih, sanitasi yang memadai, transportasi yang handal, serta cara untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan amenities lainnya.

Dalam penelitian lainnya, makna ketimpangan yang dilihat dari aspek fisik perkotaan mulai dari pemerataan pembangunan dari pola *land use* merupakan salah satu pemerataan *spasial* atau yang dikenal dengan istilah *spasial equity*. Namun, jika dikaitkan dengan aspek sosio-ekonomi, *spasial equity* berhubungan dengan aliran barang dan jasa yang adil dari satu area spasial ke area spasial lainnya (Buhangin, 2013). Aksesibilitas spasial lingkungan berkaitan dengan kemudahan lingkungan perumahan yang dapat menjangkau amenities, begitu juga kualitas, kuantitas, dan tipe aktivitas yang ditawarkan dari amenities tersebut (Hewko, 2001). Menurut Hewko, dalam menilai *spasial equity* akan melibatkan perbandingan aksesibilitas spasial lingkungan (NSA) dengan indikator kebutuhan fasilitas dalam lingkungan. Kualitas amenities mempengaruhi indikator NSA dalam mendukung penilaian *spasial equity*. Anggapan mengenai pekerjaan sebagai sumber pemicu aktivitas dari pendapatan, sesuai penemuan (Loo & Chow, 2011) mengenai struktur ruang terbentuk berdasarkan populasi yang ada dan distribusi pekerjaan di kota dari waktu ke waktu. Pernyataan tersebut secara tidak langsung menjelaskan adanya hubungan antara *spatial equity* dengan arah pemanfaatan ruang serta aktivitas perekonomian yang ada di dalamnya. Penyediaan aktivitas perekonomian melalui kemudahan dalam memperoleh kesempatan pekerjaan pada area pertumbuhan, selain menciptakan transportasi berkelanjutan juga akan memberikan kesempatan bagi pendapatan lokal masyarakat *low-income* yang tinggal di tempat yang kurang terlayani, yang sesuai pernyataan oleh (Buhangin, 2013; Hewko, 2001; Loo & Chow, 2011). Pada penjelasan

penemuan oleh (Buhangin, 2013; Hewko, 2001; Loo & Chow, 2011; Mahendra et al., 2021; Pérez-Paredes & Krstikj, 2020) terlihat bahwa besarnya pengaruh bentuk dari pemanfaatan ruang kota terhadap kontribusi ketimpangan pendapatan penduduk dengan berbagai ragam populasi dalam hal bentuk struktur ruang kota dan pola ruang kota menjadikan pentingnya dalam mendalami spasial equity dalam suatu kota terutama pusat kota terhadap penetapan strategi rencana perencanaan kota baik secara struktur kota maupun pola ruang kota.

Tujuan dari review literatur ini adalah mengungkap dan menjelaskan keterkaitan dari bentuk perkembangan pemanfaatan ruang kota dalam pengaruhnya terhadap ketimpangan ekonomi penduduk terutama ketimpangan pendapatan penduduk. Hubungan tersebut akan menjelaskan bagaimana posisi konsep *spasial equity* pada perencanaan kota dengan fenomena ketimpangan pendapatan dan menggambarkan metode analisis perspektif spasial sebagai salah satu metode dalam mengukur tingkat dan penjelasan fakta empiris dari fenomena ketimpangan di perkotaan terutama negara berkembang. Adapun manfaat dari review literatur ini adalah memberikan kontribusi teoritis dalam pengayaan terkait hubungan bentuk pemanfaatan ruang kota dengan pemerataan ekonomi penduduk, *spasial marginalisasi*, *spasial equity*, *spasial justice*, dan *urban equity*, dan *equitable planning*. Pemanfaatan naratif literatur *review* untuk mendukung kajian literatur dalam penyusunan tesis dari peneliti.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode *narrative litterature* dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian paper ini akan menggunakan data sekunder sebagai dasar kajian dari berbagai buku, jurnal, laporan, artikel, dan tesis/disertasi. Adapun metode analisis menggunakan *literature study* berupa kegiatan yang terdiri dari pengumpulan data, membaca dan mencatat data, dan mengolah bahan hingga menjadi kesimpulan (Mestika Zed, 2004).

Tahap Analisis pertama yaitu mengumpulkan data penelitian terkait *Spasial Equity* dari *equitable palnning* dalam pemanfaatan ruang kota. Proses pengumpulan berdasarkan penelitian yang berhubungan dengan bentuk kota, ekonomi penduduk, marginalisasi ekonomi, dan segregasi fisik kota. Data yang telah dikumpulkan kemudian dibaca dan dicatat melalui pembahasan masing-masing konten secara ringkas bersifat deskriptif. Kemudian tahap selanjutnya, data yang telah di bahas akan dikuatkan melalui salah satu studi kasus penelitian yang telah membahas terkait hubungan antara perwujudan *urban equity* secara *spasial* dari adanya fenomena segregasi dan eksklusivitas dari tingkat distribusi sosio-ekonomi penduduk perkotaan.

Kota Bogota menjadi salah satu studi kasus yang dipilih dalam memodelkan ketimpangan ekonomi secara perspektif spasial dengan kondisi distribusi kepadatan yang berbeda di dalam wilayah perkotaan beserta efek yang berbeda terhadap populasi penduduk di masing-masing zona. Pertumbuhan penduduk yang signifikan menjadi salah satu alasan Kota Bogota menjadi studi kasus penelitian oleh (Guzman & Bocarejo, 2017). Kota Bogota yang berada di Negara Kolombia merupakan negara paling timpang dengan Koefisien GINI 0,536 dari data ECLAC 2013 (Departemen Statistik Nasional Kolombia). Adanya ketimpangan terutama defisit perumahan memungkinkan meningkatnya permukiman informal dan tak terencana. Hasil dari contoh pembahasan studi kasus akan menjadi penguat ataupun pembuktian terhadap data literatur yang telah di catat sebelumnya. Dan tahapan terakhir berupa kesimpulan dari masing-masing literatur dan studi kasus yang dijadikan satu perbandingan hasil akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Pada pembahasan dalam narative literatur, dilakukan tinjauan pustaka sebagai dasar pemahaman dalam penjelasan teori seputar *equitable planning*, kesetaraan ruang dari kota yang

adil, hubungan marginalisasi ekonomi dan segregasi fisik kota, masa depan *Urban Equity*, dan studi kasus Kota Bogota dalam permodelan ketimpangan sosio-ekonomi penduduk kota.

Equitable Planning

Dalam berbagai perencanaan di kota maupun di wilayah, pemahaman mengenai pemerataan sering kali mulai dijadikan sebagai paradigma pembangunan bernuansa sosial dan ekonomi. Dalam memahami pandangan pemerataan, kata *equity* dan *equality* sering digunakan secara bergantian, namun memiliki arti yang berbeda dalam prakteknya. *Equality* dimaksudkan sebagai pemerataan bagi setiap orang dengan kondisi penerimaan dalam hal dan porsi yang sama tanpa memandang faktor-faktor pertimbangan lainnya. Pada *equity*, lebih pada keadilan dalam meastikan setiap orang memiliki akses ataupun peluang yang sama dengan menyesuaikan kebutuhan perkembangan dan pencapaian keberhasilan masing-masing. Perbedaan yang mendasar dari kedua pemahaman pemerataan tersebut terletak pada titik awal dari kondisi masing-masing individu. Pada *equality*, titik awal kondisi dianggap sama, sedangkan pada *equity* titik awal akan menjadi pertimbangan dalam penyesuaian kebutuhan dari setiap individu yang berbeda-beda. Sehingga, sebelum mencapai pemahaman *equality*, harus memahami konsep *equity* dalam perencanaan, terutama yang menyangkut keadilan bagi orang banyak (Yuen et al., 2017).

Kesetaraan Ruang dari Kota yang Adil

Perkembangan suatu kota/wilayah sangat identik dengan pembangunan ekonomi, teknologi, dan kreativitas budaya sebagai kausalitas dari *urban spasial*. Kesadaran akan *spasial* yang terbaru telah membangun pemikiran dari permasalahan lampau mengenai pengaruh dan permasalahan subjek daerah *peripheral* di kota. Bagaimana perspektif *spasial* ini secara kritis telah memberikan pengaruh yang kuat dalam membentuk perilaku manusia, tindakan politik, dan perkembangan masyarakat. Perspektif *spasial* memberikan gambaran dari upaya pembukaan ide dan pendekatan baru yang sebelumnya terabaikan dan terpinggirkan secara sistematis di masa lampau. Secara pergerakan dalam perspektif *spasial*, akan memberikan hasil teoritis dan praktis secara signifikan dalam memunculkan pergerakan baru pada pencarian ataupun penemuan pengetahuan yang tersembunyi, teori-teori alternatif, dan pemahaman yang akan direvisi (misalnya efek aglomerasi perkotaan dan pencarian *spasial justice*) (Soja, 2010). Sehingga, perspektif *spasial* berlandaskan strategis dapat memperluas jangkauan pemahaman dari teori menuju praktik.

Spasial justice sangat dipengaruhi oleh batas teritorial dan kekuasaan hierarki, namun selain itu ternyata juga berhubungan dengan keputusan dari pemilihan lokasi dan pengaruh agregasi distribusi, yang sesuai dengan buku O'Sullivan dalam bukunya *Urban Economics* tentang bagaimana pengaruh dari *equilibrium* lokasi dengan utilitas dalam kota terlihat dari bagaimana perbedaan jenis ekonomi dalam lokalisasi dan keragaman mempengaruhi aglomerasi ekonomi dan tingkat utilitas kota (O'sullivan, 2012).

Ketidakseimbangan dari distribusi merupakan salah satu *spasial injustice* yang paling mendasar dan bentuk yang jelas dalam penjelasan perspektif *spasial* dibanding dari proses produksinya. Jika dicontohkan dalam perhitungan penempatan berdasarkan kesamaan akses ke semua penduduk, maka pandangan secara *spasial* akan dinilai timpang atau cenderung *inequality* karena adanya perbedaan lokasi relatif dan jarak dengan mayoritas penentu lokasi oleh pemilik layanan tersebut. Menurut (Soja, 2010), faktor yang mempengaruhi adanya ketimpangan distribusi adalah persyaratan anggaran, inefisiensi institusi, keserakahan pihak tertentu, perbedaan kekayaan dan kekuatan sosial.

Konsep *spasial justice* saat ini telah memiliki keragaman dalam wacana sehingga saling tumpang tindih satu sama lain. Misalnya, gagasan konsep '*right to the city*' sebagai pengembangan dari *spasial justice*, dan gagasan konsep '*just city*' yang secara eksplisit menjadi

argumen inovatif dalam penerapan perspektif spasial. Penilaian *equity* pada konsep *just city* mengacu pada pendistribusian manfaat material dan non-material dari kebijakan publik yang diharapkan tidak mengarah pada kelompok yang sudah dalam kondisi lebih baik (Fainstein, 2010). Mekanisme pemerintah pada umumnya menciptakan pertumbuhan kota/wilayah melalui pelibatan investasi dalam infrastruktur, subsidi dan bantuan pengembangan seputar bisnis properti, dan pemasaran kota. Strategi yang dipraktikkan dalam memicu pertumbuhan yaitu pengembangan pembangunan yang berfokus pada perkantoran, retail mal, fasilitas olahraga, pariwisata, *clustering* industri, pemeliharaan kelas kreatif, dan pengembangan seni. Namun keinginan dari strategi pertumbuhan tersebut hanya bersifat asumsi dalam memberikan dampak. Pertimbangan dari strategi pertumbuhan tersebut tanpa melihat aspek sosial terutama kelompok masyarakat dalam kondisi yang kurang menguntungkan akan memberikan permasalahan ketimpangan sosial, sesuai dengan pendapat Fainstein dalam mencapai *just city* perlu pertimbangan konsekuensi terhadap pencapaian *social equity*.

Keadilan kota identik pada tiga kualitas utama yaitu *equity*, demokrasi, dan keberagaman (Fainstein, 2010). Fainstein menekankan pada maksimalisasi dari ketiga kualitas utama keadilan kota tersebut, dibanding hanya menyatakan standar minimum pada evaluasi kebijakan kota. Kriteria ini tidak menunjukkan mengenai berapa jumlah nilai yang harus dipenuhi pada standar keadilan/ pertukaran apa yang dapat diterima oleh penduduk, melainkan identifikasi jenis-jenis kebijakan dalam meningkatkan keadilan pada tiga kriteria tersebut. Tujuan dari identifikasi tersebut akan menentukan program mana yang menguntungkan bagi kelompok sosial yang tidak beruntung/ termarginalkan, dan membuat bentuk pernyataan dampak dari keadilan saat memilih strategi tertentu dalam perencanaan kota.

Hubungan Marginalisasi Ekonomi dan Segregasi Fisik Perkotaan

Eksklusi ruang di perkotaan telah menjadi perbincangan pada konsep *equity* perkotaan terutama menyangkut pada *social equity*. Penelitian terkait hubungan ruang kota dengan tingkat kemiskinan mengarahkan pada formasi area miskin dalam kota. Berbagai pengkajian hanya berkonsentrasi pada faktor penyebab kemiskinan, kriminalitas, dan malaise sosial. Penggambaran hubungan morfologi kota dengan spasialisasi kemiskinan telah dilakukan pada penelitian oleh (Vaughan et al., 2005), mengenai hubungan antara pengukuran spasial dengan data sosial dengan temuan seputar sosio-spasial dari sejarah London, dan sebagai model spasial komparatif untuk memeriksa distribusi kemiskinan pada situasi perkotaan kontemporer. Pada penemuannya, distribusi kelompok/ individu yang termarginalkan secara sosio-ekonomi ternyata mengikuti pola permukiman khas yang terpengaruh oleh kondisi spasial kota. Vaughan menjelaskan bahwa struktur perkotaan mempengaruhi kondisi ekonomi dan segregasi, sehingga kelas *low-income* dirugikan akibat termarginalkan secara spasial, dan pembentukan area miskin merupakan hasil dari proses sosio-spasial yang kompleks dan efek dari para imigran.

Pada analisis hubungan kesenjangan/ketimpangan yang tumbuh di dalam kota, konsep kajian segregasi, polarisasi, eksklusi, dan marginalitas dapat diterapkan dalam menggambarkan fenomena secara empiris (Bernt & Colini, 2013). Dalam penambahannya mengenai kajian segregasi spasial, dalam pendalaman adanya eksklusi di perkotaan diartikan sebagai intensifikasi pembagian fungsional dari ruang, segregasi perumahan, konsolidasi infrastruktur produksi. Intensifikasi fungsional tersebut memperdalam adanya kesenjangan antara daerah yang kaya modal dengan yang miskin modal. Untuk itu dalam menganalisis dari fenomena segregasi secara spasial memang diperlukan dalam memberikan pendekatan secara kontekstual dalam menjelaskan bagaimana perubahan yang terlihat di skala lokal, dengan penggabungan antara struktur dan perkembangan kepemilikan pada tingkat spasial (Van Kempen, 1998). Menurut (Bernt & Colini, 2013) studi empiris mengenai eksklusi perkotaan dapat dilakukan dengan 3 pendekatan yaitu (1) Pendekatan berbasis orang vs tempat, (2) Relevan pengaruh area, dan (3)

Permasalahan skala dan integrasi hubungan skalar. Sehingga pemahaman mengenai eksklusi dan segregasi secara spasial membutuhkan konteks dalam membentuk dinamika aktual dalam mendasari perkembangan *inequity* dalam kota. Penggunaan objek penelitian harus tetap menjadi bagian dari ‘*moving target*’ dalam mencari serangkaian metode dan konsep yang tepat dalam penggambaran konsep *spasial equity* dalam kota.

Masa Depan *Urban Equity*

Berbagai penelitian selama bertahun-tahun telah banyak membahas mengenai hubungan antara bentuk fisik kota dengan perilaku manusia di dalamnya. Kota-kota kini telah banyak aktif dalam mengusung perencanaan kota berorientasi manusia. Perwujudan kota yang lebih baik bagi orang-orang telah menjadi salah satu strategi inspiratif dalam menunjukkan arah baru perencanaan kota dan kawasan yang terbangun. Kehidupan kota dengan memperhatikan orang-orang di ruang kota telah menjadi peran kunci di abad 21 dalam mencapai kota yang lebih hidup, aman, berkelanjutan, dan sehat (Gehl, 2010).

Pendefinisian *Urban equity* dalam perencanaan akan diketahui melalui bagaimana pendefinisian dalam tiga tujuan khusus, yaitu prosedural, distribusi, dan struktural (Yuen et al., 2017). Tiga tujuan ini akan mewakili bagaimana dimensi ekuitas akan memberikan strategi yang berbeda dalam pencapaiannya. Pada kerangka kerja prosedural, *equity* akan menciptakan proses perencanaan yang transparan, adil, dan inklusif dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program, rencana, dan kebijakan; dapat memastikan bahwa semua orang diperlakukan secara adil dan terbuka; dan dapat meningkatkan kesempatan keterlibatan komunitas penduduk yang terkena dampak. Hal ini sesuai dengan prinsip pendekatan keadilan oleh Pedersen bahwa pencapaian keadilan melalui partisipasi, akses terhadap informasi dan keadilan bagi kelompok minoritas serta pengambilan keputusan berdasarkan konsep ‘persetujuan yang bebas’ (Pedersen, 2010). Kemudian pada tujuan secara *distribusional*, *equity* mendistribusikan sumber daya, manfaat, dan beban secara lebih adil; dan memprioritaskan sumber daya pada komunitas yang paling besar mengalami ketidakadilan, *disproportionate*, dan kebutuhan yang tak terpenuhi. Pada tujuan secara struktural, berkomitmen dalam memperbaiki kerugian di masa lalu dan mencegah konsekuensi yang tak diinginkan di masa mendatang; serta dapat mengatasi sistem struktural dan kelembagaan yang menjadi akar penyebab ketimpangan sosial dan ras (Yuen et al., 2017). Berikut ini metrik objektivitas dari *equity* dalam perencanaan.

Tabel 1. Objektivitas Equity dalam Perencanaan

Dimensi Equity	Objektivitas
Prosedural	<ul style="list-style-type: none"> • Proses transparan, adil, dan inklusif dalam pengembangan dan pengimplementasian pada program, perencanaan, dan kebijakan • Memastikan semua orang diperlakukan secara terbuka dan adil • Meningkatkan kesempatan pelibatan komunitas penduduk yang terimbas dampak <i>disproportionately</i>
Distribusional	<ul style="list-style-type: none"> • Pendistribusian yang adil pada manfaat, sumberdaya, dan beban yang ditanggung • Prioritas sumberdaya pada komunitas dengan kondisi <i>inequities</i>, <i>disproportionate</i>, dan <i>unmet needs</i> yang terbesar
Struktural	<ul style="list-style-type: none"> • Berkomitmen dalam perbaikan kerugian di masa lampau dan mencegah <i>unintended</i> konsekuensi di masa depan • Mengatasi sistem struktural dan institusional yang menjadi akar penyebab ketimpangan sosial dan ras.

Sumber: (Yuen et al., 2017)

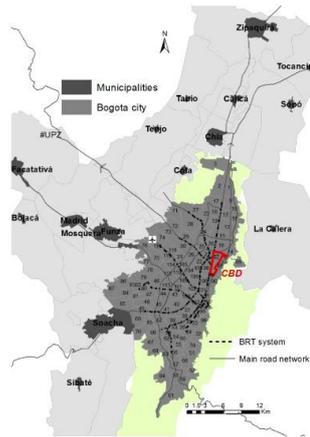
Perencanaan masa depan terutama perencanaan kota dan pembuatan kebijakan kota dibentuk dari tiga premis yang telah memandu selama beberapa abad terakhir ini, yaitu mengenai rekayasa kepadatan dan keragaman lingkungan, pengembangan ekonomi pada tempat-tempat tertentu, dan penempatan penduduk miskin dengan area yang memiliki sosial-ekonomi *opportunities*. Re-konseptualisasi pada hubungan antara orang dan *plans*, ekonomi dan lokasi, dan masyarakat miskin dan kesempatan hidup (Chapple & Karen, 2015).

Menurut (DuPuis et al., 2017), dalam mengatasi pencapaian *equity* di kota membutuhkan intervensi kesengajaan dari pemimpin kota. Bagaimana pergerakan kota-kota menuju era baru teknologi dan *governance* akan membuka peluang yang beragam dalam memprioritaskan *equity* dalam langkah menuju pembangunan masyarakat yang lebih kuat, tangguh, dan sejahtera untuk semua lapisan masyarakat. Tiga hal yang perlu dilakukan dalam mewujudkan *equity* di kota yaitu pertama, menggabungkan ekuitas sebagai prinsip utama dari perencanaan masa depan dengan tetap fleksibel memanfaatkan penggunaan teknologi baru; kedua, merangkul penggunaan teknologi dengan tetap menganggap teknologi bukanlah sifat alami; dan ketiga, secara aktif memastikan penggunaan teknologi tidak menambah bias atau *inequity* di kota.

Studi Kasus Kota Bogota

Pada tinjauan pustaka, telah dibahas bagaimana perwujudan urban *equity* pada perspektif spasial dalam mendalami adanya fenomena segregasi, eksklusif dari tingkat penduduk dan aspek sosio-ekonomi dalam pendistribusian, serta perwujudan keadilan kota dalam bentuk *equity* dengan menggunakan objek penelitian sebagai target pergerakan dalam mencari model dan konsep yang tepat untuk mengukur fenomena-fenomena yang terjadi dalam ranah lingkup perkotaan. Pada model pendalaman perspektif spasial untuk mengukur fenomena spasial marginalisasi dari bentuk ketimpangan kelas sosio-ekonomi penduduk kota, maka paper ini akan menggunakan salah satu contoh penelitian oleh (Guzman & Bocarejo, 2017) yang telah mencoba memodelkan pengukuran ketimpangan ekonomi penduduk secara perspektif spasial dengan fakta-fakta dalam lokasi dan akses dari kelompok sosio-ekonomi dengan indikator pengukuran pendapatan penduduk, pola ruang, populasi, aksesibilitas ke CBD, dan aktivitas ekonomi kota.

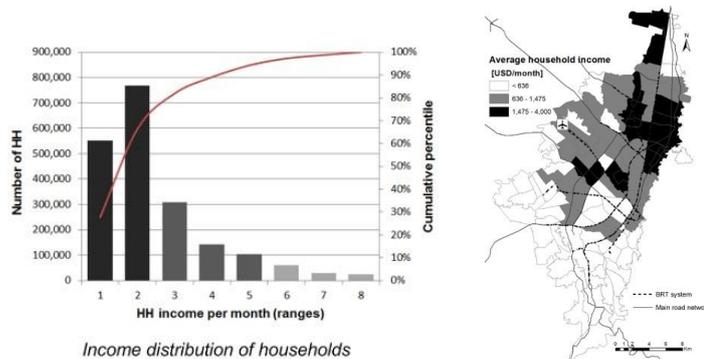
Lokasi penelitian berada di Kota Bogota sebagai Ibu kota Negara Kolombia. Adapun bagian diskusi dan hasil akan mengkaji bagaimana pendekatan, metode analisis, dan hasil penelitian dalam menggambarkan hubungan spasial *equity* pada ketimpangan ekonomi penduduk kota yang akan dikaitkan dengan kajian literatur yang telah dibahas sebelumnya. Pada wilayah perkotaan Kota Bogota, memiliki 112 'unit perencanaan zona' atau UPZ yang merupakan unit teritorial yang digunakan dalam merencanakan pembangunan perkotaan dalam tingkat zona, dengan mengikuti batas-batas fisik seperti jalan dan alam. Ukuran dari UPZ masing-masing berkisar antara 0,4-9 km². Berdasarkan data Kantor perencanaan Kota Bogota, pada tahun 2011, jumlah populasi Bogota yaitu 7,35 juta orang (2,24 juta KK), dan di tahun 2020 meningkat menjadi 8,3 juta orang. Sedangkan kota-kota di sekitarnya yang berjumlah 12 kota memiliki populasi 1,22 juta orang. Berikut peta wilayah perkotaan Kota Bogota dan beberapa kota madya di sekitarnya.



Gambar 1. Peta Wilayah Perkotaan Kota Bogota dan Kotamadya lainnya
 Sumber: (Guzman & Bocarejo, 2017)

Kota Bogota merupakan kota terpadat di dunia, namun kepadatan didistribusikan secara berbeda di dalam wilayah perkotaan dengan memberikan efek yang berbeda pada populasi penduduk (Guzman & Bocarejo, 2017). Asumsi awal dari kondisi tersebut akan menimbulkan diferensial lokasi dan akses diantara kelompok sosio-ekonomi kota. Penerapan Transmilenio (BRT) menjadi salah satu faktor pemicu peningkatan sektor kependudukan terutama penduduk *low income*, namun secara ekuitas Negara Kolombia merupakan negara paling timpang dengan koefisien GINI sebesar 0,536 berdasarkan data ECLAC, 2013. Indeks gini tersebut telah meningkat 1,4 % dari tahun sebelumnya (Departemen Statistik Nasional Kolombia).

Pemodelan karakteristik sosio-ekonomi dan pola mobilitas penduduk dilakukan melalui survei mobilitas dengan rata-rata pendapatan/bulan dengan pengklasifikasian 8 kelompok, dengan penggambaran distribusi grafik rentang pendapatan dan distribusi secara spasial. Dari data diperoleh, 66% KK dalam rentang terendah (1&2), 82% berpenghasilan kurang dari \$1.050/bulan.



Gambar 2. Grafik Rentang Distribusi Pendapatan (kiri) dan Peta Distribusi Kelompok Pendapatan (kanan)
 Sumber: (Guzman & Bocarejo, 2017)

Kemudian penjabaran fakta lain mengenai kepadatan yang khas dengan perbedaan antara populasi dan lokasi (pekerjaan) di seluruh perkotaan, dimana dari adanya defisit perumahan terutama perumahan sosial, menjadikan pembangunan perkotaan berbasis di permukiman *unplanned* dan informal. Sehingga memunculkan lingkungan informal di pinggiran kota dengan kondisi kehidupan yang buruk dan memicu kepadatan tinggi. Spasialisasi dilakukan dalam menunjukkan kepadatan penduduk dan kepadatan pekerjaan. Hasil spasialisasi tersebut menggambarkan kepadatan yang tinggi di pinggiran dengan minim fasilitas dan pekerjaan. Lokasi pekerjaan berada di pusat kota sepanjang koridor jalan utama dan utara pusat kota (zona terkaya). Hasil ini menunjukkan bahwa penduduk tidak tinggal di lokasi pekerjaan berada. Selain itu, adanya penetapan luasan tempat tinggal berdasarkan tingkat pendapatan. Pendapatan

rendah mendapatkan unit rumah yang kecil (20m^2 per orang) dibanding pendapatan sedang (35m^2 per orang) dan pendapatan tinggi (80m^2 per orang) (Gambar 2). Sedangkan rumah tangga *low-income* rata-rata beranggotakan lebih dari empat anggota keluarga. Data ini menunjukkan adanya disparitas antar kelompok pendapatan.

Analisis zona kegiatan ekonomi yang lebih tinggi ditetapkan sebagai pusat bisnis, maka digunakan UPZ dengan kepadatan kerja tertinggi. UPZ Chico-Lago ditetapkan sebagai zona kegiatan ekonomi tertinggi (CBD) dan merupakan zona terkaya. Berdasarkan zona pusat bisnis yang dikaitkan dengan analisis sistem transportasi, menggunakan data perjalanan kerja, menunjukkan transportasi dari kelompok pendapatan rendah cenderung minim dalam menggunakan transportasi umum (BRT dan bus reguler) untuk kegiatan kerja harian dengan persentase mobilitas menunjukkan 0,8% pada perjalanan kerja, dan 0,6% dari total perjalanan. Penduduk *low-income* lebih sering jalan kaki dan bersepeda, sedangkan *high-income* menggunakan taksi dan mobil. Dari totalnya, mobilitas tidak bermotor mewakili 10% dari perjalanan kerja. Sebagian besar tempat tinggal *low-income* berada di pinggiran kota, dengan transportasi mengalami keterbatasan *supply*. Sehingga biaya ongkos transportasi membuat penduduk *low-income* tidak punya pilihan selain berjalan kaki. Akibatnya, penduduk *low-income* menghadapi tingkat aksesibilitas yang rendah terhadap pekerjaan.

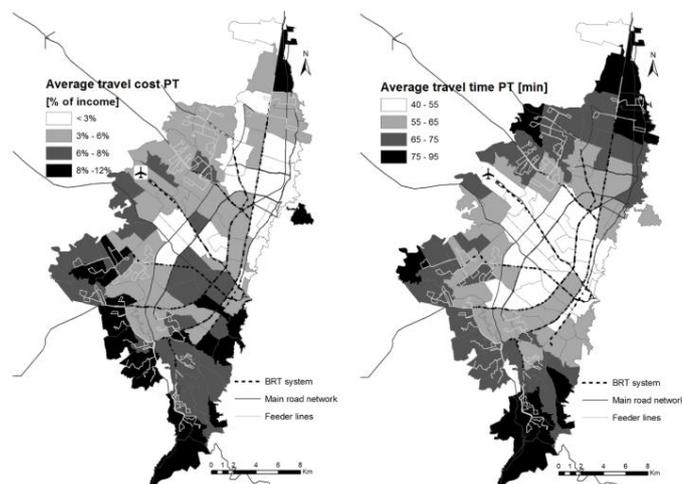
Dalam penilaian tingkat ekuitas, (Guzman & Bocarejo, 2017) menggunakan indikator keseimbangan teritorial, distribusi spasial dari populasi, *vertical equity* dalam aksesibilitas, dan mobilitas perkotaan. Penilaian dari keseimbangan teritorial, para penduduk zona penghasilan rendah (rasio pekerjaan-rumah tangga rendah) menghabiskan banyak waktu menuju ke tempat kerja. Sehingga 42% menghabiskan waktu bepergian dibanding segmen orang kaya. Hal tersebut menciptakan konfigurasi spasial yang tidak seimbang dengan penempatan kelompok paling rentan di lokasi yang jauh dan tidak terjangkau. Ketimpangan dari zona *job-housing* ini mengindikasikan adanya keterlibatan populasi dan konsentrasi yang tidak seimbang di pinggiran kota, yang dipicu oleh permintaan transportasi yang tak terpenuhi. Jadi, ketimpangan dalam zona *job-housing* menyebabkan adanya kemacetan dan waktu perjalanan yang sangat tinggi.

Kemudian, pada distribusi sosial dari populasi mengindikasikan adanya kepadatan populasi di pinggiran kota dengan penduduk *lower-income* dan kepadatan rendah di pusat kota dengan kondisi proporsi tinggi dari bangunan tinggi dan level pendapatan yang tinggi. Hasil menunjukkan bahwa penduduk *low-income* harus bertahan dengan waktu perjalanan yang tinggi. Analisis kepadatan juga mengungkapkan proses konsentrasi kota Bogota terutama zona dengan proporsi pendapatan rendah.

Selanjutnya penilaian dari pemerataan vertikal dalam aksesibilitas menggunakan koefisien indeks GINI. Metode ini digunakan dalam membandingkan indeks aksesibilitas dengan populasi Bogota dalam mengevaluasi pemerataan secara vertikal. Penggambaran dalam menilai pemerataan aksesibilitas untuk bekerja antar kelompok pendapatan menggunakan jumlah pekerjaan yang dapat dicapai dalam perjalanan kendaraan tertentu. Penggunaan ukuran kontur dan *isochronic* menjelaskan indeks aksesibilitas dengan kondisi semakin tinggi indeks, maka semakin banyak pekerjaan yang dapat dicapai (dalam hal ini menggunakan 45 menit perjalanan). Penggambaran dilakukan dengan *memplot* indeks terhadap kelompok populasi, dengan hasil bahwa hampir 80% kelompok *low-income* mengalami tingkat aksesibilitas rendah dibanding pendapatan lainnya. Sehingga kelompok berpenghasilan rendah mengalami kerugian posisi karena cenderung tinggal jauh dari tujuan pekerjaan utama dan kecepatan perjalanan yang rendah dari penggunaan transportasi umum.

Terakhir, pada penilaian mobilitas perkotaan, kelompok pendapatan rendah mengalami kondisi yang sangat tidak setara dalam hal kepadatan, kualitas perkotaan, pola mobilitas, dan tingkat perjalanan yang berbeda. Pada penduduk *low-income* mendapatkan efek ketidaksesuaian spasial karena lokasi tempat tinggal di selatan dan barat kota, dengan kondisi

jauh dari kepadatan peluang kerja yang tinggi (CBD). Penggunaan moda transportasi yang bermayoritaskan transportasi umum dan berjalan kaki merupakan pilihan satu-satunya akibat ketidakmampuan dalam membayar ongkos perjalanan menuju tempat bekerja. Kecenderungan waktu perjalanan masih tinggi walaupun ada sistem transmileno. Efek dari ketidaksesuaian spasial mencakup biaya perjalanan yang tinggi serta waktu perjalanan yang besar.



Gambar 3. Biaya Perjalanan dan Rata-rata waktu perjalanan dengan Transportasi Publik
Sumber: (Guzman & Bocarejo, 2017)

Sistem transportasi umum di Kota Bogota sangat dipengaruhi oleh inefisiensi dan dipandang sebagai layanan untuk masyarakat miskin. Ketergantungan pada layanan perjalanan publik, membuat penduduk *low-income* mengalami perjalanan yang panjang karena sedikitnya peluang ekonomi di dekat zona tempat tinggal mereka. Adanya perbedaan uang transportasi dan pendapatan menjadikan penduduk miskin menghabiskan 30% banyak waktu dan 2 kali lipat uang perjalanan dibanding kelompok yang kaya. Fakta perbedaan tarif menurut kelompok pendapatan tersebut menjelaskan mobilitas yang tidak merata pada perkotaan Bogota (Gambar 3).

PEMBAHASAN

Dari penelitian oleh Guzman dan Bocarejo, menjelaskan bagaimana bentuk spasial perkotaan yang dilihat dari lokasi rumah tangga, pusat pekerjaan, tingkat pendapatan, dan distribusi spasial yang menjelaskan fakta dari ketimpangan yang ada di perkotaan Bogota. Permasalahan pemerataan spasial, penting untuk dikaji bagi kota-kota berkembang dengan fenomena penurunan sistematis kualitas hidup pada zona-zona yang sosio-ekonominya kurang beruntung. Penambahan spasial *inequity* juga ditegaskan dalam hal lokasi (lokasi rumah vs lokasi pekerjaan) dan mobilitas (waktu dan biaya perjalanan). Rendahnya akses dan buruknya kualitas transportasi publik memperparah kondisi tingkat aksesibilitas penduduk *low-income*.

Penggambaran perspektif spasial oleh Guzman menjelaskan pentingnya lokasi rumah tangga dalam akses terhadap peluang terutama peluang kesempatan kerja. Guzman menjelaskan mengenai arahan kebijakan yang harus memperhatikan perumahan sosial dan subsidi dari angkutan umum. Hubungan antara permintaan perjalanan dan struktur perkotaan menjadi topik yang masih perlu dikaji dalam kebijakan yang berkaitan dengan perjalanan dan struktur kota dengan bekal pemahaman yang baik terkait interaksi antar perjalanan, permintaan dan struktur perkotaan, serta interaksi dari waktu ke waktu. Kota harus menempatkan lokasi bisnis dekat dengan area perumahan, khususnya daerah tertinggal, dalam meningkatkan infrastruktur transportasi, kualitas transportasi umum dan fasilitas perkotaan, atau kombinasi

semua hal tersebut (Guzman & Bocarejo, 2017). Sudut pandang transportasi mengenai pentingnya angkutan umum yang terjangkau dan mudah diakses dipandang sebagai alat dalam mengatasi *inequity* jenis ini terutama penyebab dari tingkat aksesibilitas yang tidak merata di perkotaan. Berikut lampiran hasil review dan catatan penting dari masing-masing hasil review literatur pada tabel 2.

Tabel 2. Appendix literature review

Literature	Review	Catatan
Perencanaan yang Adil		
<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan 	<p><i>Equality</i> Pemerataan dalam kondisi dan porsi yang sama tanpa pertimbangan faktor lainnya.</p> <p><i>Equity</i> Pemerataan akses dan peluang yang sama melalui penyesuaian keberhasilan masing-masing</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Titik awal kondisi individu • Perwujudan Equitable melalui Equity
City and Spasial Justice		
<ul style="list-style-type: none"> • Kausalitas Perkembangan Kota • Pengaruh perspektif spasial • Hubungan spasial justice dan equity • Faktor Inequality distribution • Konsep equity pada just city • Konsep just city 	<ul style="list-style-type: none"> • Kausalitas urban spasial identik berasal dari perkembangan ekonomi, teknologi, dan kreativitas budaya • Perspektif spasial secara signifikan memberikan pengaruh dalam perilaku manusia, tindakan politik, dan perkembangan masyarakat. • Hubungan spasial justice dan equity dipengaruhi batas teritorial, kekuasaan hirarki, pemilihan lokasi, dan agregasi distribusi • Faktor Inequality distribusi adalah persyaratan anggaran, inefisiensi institusi, keserakahan pihak tertentu, dan perbedaan kekayaan dan kekuatan sosial • Konsep equity pada just city mengarah pada pendistribusian manfaat material dan non-material dari kebijakan publik yang ditujukan pada masyarakat kondisi kurang menguntungkan • Keadilan kota identik pada tiga kualitas utama antara lain demokrasi, equity, dan keberagaman • Dalam identifikasi jenis kebijakan yang dapat meningkatkan tiga kualitas utama keadilan kota, perlunya penentuan program bermanfaat bagi kelompok sosial yang termarginalkan, pembuatan pernyataan dampak keadilan saat pemilihan strategi dalam perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep equity merupakan turunan spasial justice dan just city • Perspektif spasial berfungsi sebagai gambaran fenomena secara sistematis yang selama ini masih terabaikan • Kontribusi perspektif spasial memberikan signifikansi terhadap penemuan, pengembangan, dan perbaikan dari hasil secara teoritis maupun praktis • Perspektif spasial equity sebagai <i>advancement</i> dari evaluasi kebijakan
Hubungan Ketimpangan Ekonomi dan Pengelompokan Fisik Kota		
<ul style="list-style-type: none"> • Eklusi Ruang • Morfologi dan Spasialisasi kemiskinan • Marginalisasi sosio-ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Persoalan eksklusi ruang pada konsep equity berkaitan pada social equity • Hubungan morfologi kota dan tingkat kemiskinan mengarah pada formasi/ 	<ul style="list-style-type: none"> • Eklusi ruang sebagai fenomena ketimpangan sosial melalui hubungan antara morfologi dan

<ul style="list-style-type: none"> • Segregasi Spasial 	<p>distribusi kemiskinan dalam kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struktur perkotaan mempengaruhi kondisi ekonomi dan segregasi dari proses sosio-spasial yang kompleks dan arus urbanisasi • Hubungan kesenjangan dalam kota dapat digambarkan secara empiris melalui kajian fenomena segregasi, polarisasi, ekslusi, dan marginalitas • Ekslusi ruang pada fenomena segregasi spasial perkotaan merupakan intensifikasi pembagian fungsional dari ruang, segregasi perumahan, dan konsolidasi infrastruktur produksi • Pendekatan studi ekslusi perkotaan secara empiris dapat dilakukan melalui pendekatan berbasis orang vs tempat, relevansi dari pengaruh area, dan permasalahan secara skala dan integrasi hubungannya 	<p>tingkat spasialisasi marginal dari kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendalaman fenomena inequality dapat dilakukan melalui kajian segregasi, polarisasi, ekslusi, dan marginalisasi • Pendekatan perspektif spasial merupakan analisis yang bersifat kontekstual dari fenomena inequality
<hr/> <p>Masa Depan Urban Equity</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Paradigma baru dalam pembangunan • Objektivitas urban equity dalam equitable planning • Masa depan dari premis perencanaan • Perwujudan Equity di kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Kehidupan kota dengan memperhatikan penduduk di kota menjadi peran kunci abad 21 dalam mencapai livable city, aman, berkelanjutan, dan sehat • Tujuan khusus dari konsep perencanaan urban equity didefinisikan melalui prosedural, distribusi, dan struktural • Premis perencanaan masa depan mengenai rekayasa kepadatan dan keragaman lingkungan, pengembangan ekonomi di tempat tertentu, dan penempatan penduduk miskin pada area yang baik dalam sosio-ekonomi opportunities • Tiga hal perwujudan equity di kota yaitu ekuitas sebagai prinsip utama yang fleksible dalam memanfaatkan teknologi baru, penggunaan teknologi dengan asumsi hal itu bukan sebagai sifat alami, dan terakhir aktif dalam memastikan teknologi tidak menambah inequity di kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Orientasi manusia/sosial sebagai paradigma perencanaan masa kini • Tiga objektivitas urban equity (prosedural, distribution, dan struktural) sebagai kerangka kerja penyusunan strategi equitable planning • Premis perencanaan dan kebijakan masa depan tersebut merupakan re-konseptualisasi hubungan antara orang dan perencanaan, ekonomi dan lokasi, serta masyarakat miskin dan kesempatan hidup

Sumber: Peneliti (2023)

KESIMPULAN

Pada penjelasan dan penggambaran dari model penelitian oleh Guzman dan Bocarejo, menjelaskan bagaimana pengaturan fakta-fakta empiris pada fenomena ketimpangan pendapatan penduduk di perkotaan dengan analisis metode spasial. Pengkajian metode perspektif spasial telah membantu penelitian dalam mengungkapkan hubungan ketimpangan yang terjadi pada marginalisasi sosio-ekonomi penduduk yang terpengaruh oleh bentuk struktur dan pola guna lahan di perkotaan. Pengkaitan hubungan secara spasial menjelaskan secara mendalam dan terukur bagaimana berbagai fakta empiris ketimpangan pendapatan penduduk dipengaruhi oleh lokasi tempat tinggal, distribusi pekerjaan, distribusi transportasi umum, dan

proses marginalisasi dari ketimpangan penduduk di perkotaan. Adanya hubungan yang erat dalam pengkajian sosial dan ekonomi penduduk dengan aspek spasial kota menjadikan pentingnya pendalaman spasial *equity* pada perwujudan kota yang adil menuju kota yang lebih berkelanjutan. Pendalaman prinsip *equity* perlu dikaji terlebih dahulu dalam menerapkan konsep *equitable planning* terutama perencanaan kota dan wilayah. Tanpa pendalaman prinsip *equity*, memungkinkan terjadinya bias pada konsep *equitable* dengan pemerataan yang tidak memandang kebutuhan setiap individu terutama pada aspek sosio-ekonomi penduduk suatu wilayah/kota.

Pengkajian literatur mengenai keterkaitan antara bentuk pemanfaatan ruang kota dengan ketimpangan pendapatan penduduk merupakan salah satu kajian pendalaman dari konsep spasial *equity* yang berasal dari *spatial justice* dan *just city* dalam perwujudan menuju *just sustainable city*. Topik pemerataan menjadikan salah satu topik *equitable planning* yang semakin menjadi perbincangan dalam merencanakan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan di masa mendatang.



Gambar 4. Dampak Ketidakmerataan Spasial berupa Segregasi Spasial dan Sosial dalam Perkotaan

Sumber: (The conversation.com, 2018)

Aspek perspektif spasial pada sebagian besar penelitian sebelumnya memposisikan spasial sebagai pembuktian teori, penjelasan fakta-fakta empiris, dan kajian keterhubungan dari fenomena ketimpangan perkotaan yang berwawasan sosial dan ekonomi. Kelanjutan perspektif spasial dalam *spatial equity* dapat dilakukan melalui kajian kesesuaian kebijakan perkotaan yang telah atau baru akan menerapkan aspek pemerataan pembangunan. Sehingga, penilaian kebijakan yang selama ini hanya berfokus pada satu permasalahan saja menjadi lebih mudah dalam mengidentifikasi kesesuaian kebijakan berdasarkan kondisi empiris dan fakta yang ada secara lebih tepat dan terstruktur.

REKOMENDASI

1. Melakukan *exploratory* terhadap kota-kota metropolitan terutama di Indonesia mengenai perwujudan *urban equity* dalam bentuk pemanfaatan ruang kota, baik pemanfaatan dalam kawasan lindung maupun kawasan budidaya.
2. Pendalaman dalam aspek kebijakan keadilan dalam distribusi manfaat kota, baik secara prosedural, distributif, maupun substantif.
3. Mengembangkan standar keadilan dalam penetapan perencanaan berbasis equal opportunity disetiap lapisan masyarakat, terutama daerah periphery kota (transisi kota-desa).

DAFTAR PUSTAKA

- Bernt, M., & Colini, L. (2013). *Exclusion, Marginalization and Peripheralization*. www.irs-net.de/download/wp-exclusion-marginalization-peripheralization.pdf
- Buhangin, J. (2013). Spatial equity: A parameter for sustainable development in indigenous regions. *WIT Transactions on Ecology and the Environment*, 179 VOLUME 2, 1343–1350. <https://doi.org/10.2495/SC131142>
- Chapple, & Karen. (2015). *Planning Sustainable Cities and Regions*.
- DuPuis, N., Stahl, E., & Rainwater, B. (2017). *The Future of Equity in Cities*.
- Fainstein, S. S. (2010). *The just city*. Cornell University Press.
- Gehl, J. (2010). *Cities for People*. Island Press.
- Guzman, L. A., & Bocarejo, J. P. (2017). Urban form and spatial urban equity in Bogota, Colombia. *Transportation Research Procedia*, 25, 4491–4506. <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.05.345>
- Hewko, J. N. (2001). *Spatial Equity in the Urban Environment: Assessing Neighborhood Accessibility to Public Amenities*. University of Alberta.
- Loo, B. P. Y., & Chow, A. S. Y. (2011). Jobs-housing balance in an era of population decentralization: An analytical framework and a case study. *Journal of Transport Geography*, 19(4), 552–562. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2010.06.004>
- Mahendra, A., King, R., Du, J., Dasgupta, A., Beard, V., Kallergis, A., & Schalch, K. (2021). Towards a More Equal City: Seven Transformations for More Equitable and Sustainable Cities. *World Resources Institute*. <https://doi.org/10.46830/wriipt.19.00124>
- Mestika Zed. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan* (Vol. 3). Yayasan Pustaka Obor.
- O'sullivan, A. (2012). *Urban Economics 8th edition* (8th ed.). Douglas Reiner.
- Pedersen, O. W. (2010). *Environmental Principles and Environmental Justice* (12; 1). <http://ssrn.com/abstract=1592850>
- Pérez-Paredes, E. A., & Krstikj, A. (2020). Spatial equity in urban public space (Ups) based on analysis of municipal public policy omissions: A case study of atizapán de zaragoza, state of méxico. *Societies*, 10(1). <https://doi.org/10.3390/soc10010008>
- Soja, E. W. (2010). *Seeking Spatial Justice*.
- The conversation.com. (2018, February 9). *Mengatasi ketimpangan dengan kekuatan perencanaan perkotaan*. The Conversation.Com. <https://theconversation.com/mengatasi-ketimpangan-dengan-kekuatan-perencanaan-perkotaan-91150>
- Van Kempen, R. (1998). Ethnic Segregation in Cities: New Form s and Explanations in a Dynamic World. *Urban Studies*, 35(10), 1631–1656.
- Vaughan, Laura., Clark, Chatford, D., & Ozlem, S. (2005). *Space and Exclusion: The Relationship between physical segregation, economic marginalisation and poverty in the city*.
- Yuen, T., Yurkovich, E., Grabowski, L., & Altshuler, B. (2017). *Guide to Equitable, Community-Driven Climate Preparedness Planning*.